

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, 2016, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Barata, Atep, 2014, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Elex Media. Komputindo. Jakarta.
- Batinggi, A dan Ahmad, Badudu, 2013, *Manajemen Pelayanan Publik*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Dharma Setyawan Salam, 2005, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Djohermansyah Djohar, 2007, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Effendi Sofian, 2005, *Membangun Good Governance Tugas Kita Bersama*, Alfabeta, Yogyakarta.
- HAS. Moenir, 2010, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Itsyadi Insani, 2016, *Standard Operating Procedures (SOP)*, Huta Media, Depok.
- Jeremias T. Keban, 1995, *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah*, UGM, Yogyakarta.
- Joko Widodo, 2001, *Good Governance*, Insan Cendekia, Surabaya.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Playanan Publik*, Nuansa, Bandung.
- Kasmir, 2005, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Rangga Bawono, Icuk, 2007, *Manajemen Strategik Sektor Publik : Langkah Tepat Menuju Good Governance*, Unsoed Purwokerto.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2000, *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika perubahan Lingkungan*, CV.Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soetendyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma, Jakarta.

Jurnal

Dasep Dodi Hidayah, *Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara-ISSN 2614-2945 Volume 7 Nomor 1, Bulan April Tahun 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalaya.

Mety Aspalinda, *Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun (Studi Kasus Pada Pelayanan Akta Kelahiran)*, Jurnal Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293.

Nixon Edwar Samuel Tude, Novie R. Pioh, Welly Waworundeng, *Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 4 No. 4 Tahun 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Fispol Unsrat.
Prayugo, Rommy, *Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Tanjung Pinang*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2016.

Robi Cahyadi Kurniawan, *Tantangan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, 2020.

Yayat Rukayat, *Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pasirjambu*, Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) No.2 Tahun XI Juni 2017.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Pasal 22 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kudus;

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

